

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Organisasi sektor publik saat ini tengah dalam masa transisi menghadapi perubahan dalam penerapan standar akuntansi. Standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yang dalam pelaporan keuangannya menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana, saat ini telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 menggunakan *full accrual basis*, dimana mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual diharapkan dapat memberikan landasan penerapan akuntansi pemerintahan yang lebih baik. Perubahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah di Indonesia. (Herlina,2013)

Menurut Pemerintah, melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual, kualitas penyajian informasi keuangan organisasi pemerintah dapat ditingkatkan. Kualitas laporan keuangan yang baik bermanfaat untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang disediakan, manajemen dan pengendalian aset negara, perencanaan, penyusunan program dan anggaran. Informasi keuangan sektor publik yang berkualitas akan mengurangi kesenjangan informasi (*information asymmetric*) antara pemerintah dengan masyarakat dan *stakeholder* lain atas penggunaan dan alokasi keuangan negara. Standar akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik. (Halim dan Kusufi dalam Setyaningsih 2013).

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut. Kemudian sebagai pedoman pelaksanaannya terbit pula Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun hingga batas waktu yang ditetapkan, pemerintah belum berhasil menerapkan sistem akuntansi yang baru. Hingga terbit Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengganti PP No. 24 Tahun 2005. Pada PP No. 71 Tahun 2010 batas waktu

penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) diundur sampai dengan tahun 2014.

Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan pemerintah yang baik (*good governance*), seperti yang tertuang dalam penjelasan bahwa “ Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai”. (Mardiasmo, 2002).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyusunan dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar maka harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintah yang mengatur sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*). Prinsip tepat waktu dalam menghasilkan laporan keuangan bergantung dengan kinerja perangkat daerah dalam menyusun dan menyampaikan pertanggung jawaban keuangan pemerintah sesuai SAP yang berlaku.

Penelitian mengenai tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan standar akuntansi yang baru (*full accrual*) dapat

dikatakan masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian kualitatif yang telah dilakukan oleh Setyaningsih (2013) terdapat beberapa masalah diantaranya mengenai tingkat pemahaman aparatur pemerintah yang masih rendah, masih terdapat kerumitan teknis penyusunan pelaporan, pemahaman anggota dewan terhadap SAP yang masih rendah dan faktor-faktor penghambat SAP yaitu pendidikan staf, pengalaman, fasilitas, sistem, komitmen pimpinan, sosialisasi serta intensif pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian terhadap instansi pemerintah daerah dengan menggunakan penelitian kuantitatif, karena pemerintah daerah merupakan satuan kerja yang secara langsung mengalami dampak dari setiap perubahan peraturan SAP.

Penerapan mengenai sistem akuntansi pemerintah membutuhkan proses yang berkesinambungan dan teratur. Proses dari penerapan sistem akuntansi yang baru ini tidak dapat dilihat secara langsung. Berhasil tidaknya sistem diterapkan berhubungan dengan instansi pemerintah atau satuan kerja dan beberapa faktor yang ada mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, fasilitas teknologi yang tersedia *hardware* dan *software* dan sosialisasi dalam hal pelatihan akuntansi secara teknis dalam menjalankan standar akuntansi berbasis kas menuju basis akrual.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin menguji penerapan standar akuntansi yang telah berjalan dan menguji faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman aparatur pemerintah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari faktor latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, fasilitas teknologi dan pelatihan sistem baru. Peneliti ingin mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penerapan SAP basis akrual dan kinerja penyusun laporan keuangan, sehingga faktor tersebut diatas diharapkan memberikan bukti dan gambaran mengenai penerapan sistem akuntansi akrual di pemerintah. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DAN KINERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
3. Apakah fasilitas teknologi berpengaruh pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
4. Apakah pelatihan sistem baru berpengaruh pada tingkat pemahaman

aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

5. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?
6. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?
7. Apakah fasilitas teknologi berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?
8. Apakah pelatihan sistem baru berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?
9. Apakah tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?
10. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
11. Apakah pengalaman berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
12. Apakah fasilitas teknologi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

13. Apakah pelatihan sistem baru berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
2. Mengetahui pengaruh pengalaman kerja pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
3. Mengetahui pengaruh fasilitas teknologi pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
4. Mengetahui pengaruh pelatihan sistem baru pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
5. Mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?
6. Mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?

7. Mengetahui pengaruh fasilitas teknologi terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?
8. Mengetahui pengaruh pelatihan sistem baru terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?
9. Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan?
10. Mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung latar belakang pendidikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui tingkat pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
11. Mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pengalaman kerja terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui tingkat pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
12. Mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung fasilitas teknologi terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui tingkat pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
13. Mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pelatihan sistem baru terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pemahaman terhadap SAP, dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada dalam perkuliahan.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah wawasan akademisi mengenai analisa pemahaman terhadap SAP untuk mengetahui kinerja manajerial dalam menyusun laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Bantul.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan SAP 2010, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah.